

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan disusun dan dikembangkan : (a) dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik; (b) sesuai dengan jenjang pendidikan; dan (c) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan prinsip diversifikasi, Pemerintah tidak lagi menetapkan kurikulum nasional. Oleh karena itu, penyusunannya diserahkan di tingkat satuan pendidikan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Semua itu dilakukan agar khasanah nasional yang berupa karakteristik masing-masing satuan pendidikan dapat dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Kurikulum disesuaikan dengan memanfaatkan seluas-luasnya potensi daerah dan variasi tingkat kemampuan peserta didik memperoleh perhatian penuh. Untuk menjamin mutu minimal dari layanan pendidikan dengan KTSP yang bervariasi, Pemerintah menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006, Permendiknas No.32 th. 2004, PP no 38 th. 2006, PP th. 2007 dan Permendiknas no. 41 th. 2007, Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan dua dari delapan standar yang direncanakan, yaitu standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL), yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Standar Isi ini mengatur tentang : (a) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan KTSP, (b) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, (c) komponen KTSP yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Standar Isi, dan (d) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Melengkapi peraturan-peraturan tersebut; Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menerbitkan Buku Panduan Umum Penyusunan KTSP untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kebijakan Pemerintah untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan merupakan perwujudan dari reformasi di bidang pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan setidaknya tiga strategi dari tiga belas strategi pembaharuan yang diamanatkan, yaitu : (a) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, (b) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; dan (c) pemberdayaan peran serta masyarakat.

Menyusun KTSP merupakan hal baru bagi sebagian sekolah di Indonesia karena selama ini kurikulum disusun dan ditetapkan secara nasional, sedang daerah dapat melengkapinya dengan muatan lokal. Panduan penyusunan KTSP sudah banyak dibuat oleh berbagai pihak, tetapi karena bagi sebagian satuan pendidikan merupakan hal yang baru, panduan dan contoh yang lebih operasional sangat diperlukan. Apalagi belum banyak dibuat panduan untuk mengimplementasikan dan memonitor/mengevaluasi KTSP di sekolah.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bukti nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya di sekolah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, standar kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

(a) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) belajar untuk memahami dan menghayati; (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain; dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan sekolah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah dan/atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan belajar mengajar.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan salah satu muatan kurikulum yang harus ada dalam KTSP, ketentuan belajar setiap indikator yang dikembangkan sebagai suatu pencapaian hasil belajar dari suatu kompetensi dasar antara 0 – 100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%.

Sebagaimana yang disebutkan dalam buku Materi Sosialisasi dan Pelatihan KTSP Presentasi Powerpoint Depdiknas (2007 : 370) berkisar 0 sampai dengan 100%, kriteria ditetapkan untuk masing-masing indikator idealnya berkisar 75%. Memang diangkat juga dalam buku tersebut, wacana belajar tuntas sebagaimana disebutkan pada halaman 379.

Nitko, (1996 – P. 291) :

- Peserta didik harus mencapai skor 80 – 90% sebelum beralih pada modul / topik berikutnya.
- Guru dapat menentukan skor/batas lulus untuk setiap target belajar. Patokan yang digunakan 80% atau yang mendekati.

Sedangkan BSNP 2007 bagi penulis memberi gambaran yang lebih rendah lagi dari kedua patokan tuntas seperti di atas. BSNP Model Penilaian Kelas SD/MI/SDLB (2007 : 45) menyatakan bahwa

Apabila jumlah indikator dari suatu kompetensi dasar telah tuntas lebih dari 50%, peserta didik dapat mempelajari kompetensi dasar berikutnya dengan mengikuti remedial untuk indikator yang belum tuntas. Sebaliknya apabila nilai indikator dari suatu kompetensi dasar lebih kecil dari KKM, dapat dikatakan peserta didik itu belum menuntaskan indikator itu. Apabila jumlah indikator dari suatu kompetensi dasar yang belum tuntas sama atau lebih dari 50%, peserta didik belum dapat mempelajari kompetensi dasar berikutnya.

Lain halnya dengan pengertian pembelajaran tuntas yang dijabarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Advokasi kurikulum/Bintek Pendidikan tingkat Provinsi Jawa Tengah bahwa pembelajaran tuntas adalah :

- Mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa
- Strategi pembelajaran yang berdasarkan maju berkelanjutan (continuous progress)
- Pembelajaran dipecah-pecah menjadi satuan-satuan (cermental units)
- Seorang siswa yang mempelajari unit satuan pelajaran dapat berpindah ke unit satuan pelajaran berikutnya jika siswa yang bersangkutan telah menguasai sekurang-kurangnya 75% (Dinas P dan K Prop Jateng, 2006 : 4).

Dalam hal mengapa penulis memilih obyek penelitiannya di SD Negeri se Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, sangat beralasan karena guru PAI – SDnya bisa menyepakati penentuan KKM PAI – SD dipatok 6,5. Dan mengapa penulis menggunakan anak judul Studi Kritis Terhadap Model Penilaian Kelas BSNP 2006? Karena BSNP menentukan persamaan penilaian

untuk kelompok mapel agama dan akhlak mulia serta kelompok mapel kewarganegaraan dan kepribadian (BSNP, 2006 : 5). Terlebih pada halaman 52 BSNP menentukan SK dan KD (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) mapel agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) disamakan dalam pengelompokkannya, padahal di dalam PAI SD terdapat praktik Shalat dan baca quran. Di dalam SK KD PAI – SD terdapat banyak tentang baca tulis huruf alqur'an yang cara mengajaryapun sangat berbeda, belum lagi melafalkan, mengartikan, menulis, menerjemahkan, murotal, tajwid dan masih banyak lagi.

Penetapan kriteria minimal ketuntasan belajar merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Berhadapannya kondisi riil dengan teori muatan BSNP tentang KKM ini terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka tentu ada problema tersendiri yang membutuhkan pemecahan, terlebih terhadap penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang dapat memberikan informasi sebagai bahan untuk menerapkan KKM – PAI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, pokok masalahnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Model Penilaian Kelas menurut BSNP 2006 pada PAI – SD?
2. Bagaimana Penerapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada Mata Pelajaran PAI SDN se-Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penilaian Kelas Standar BSNP 2006 bagi PAI SDN.
2. Untuk memberikan informasi bagaimana penerapan KKM pada mata pelajaran PAI – SD.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Di dalam panduan sistem penilaian yang termuat di BSNP 2006 ada pengelompokan bidang penilaian dari Pendidikan Agama termasuk kelompok budi pekerti dan moral. Sedangkan pada Pendidikan Agama Islam disebutkan sebuah tema sentral yang dimuat dalam bukunya Dirjen Bimbingan Islam 2006 bagi anak SD bahwa tema sentral Pendidikan Agama Islam SD adalah :

- a. Siswa bisa melakukan Shalat dengan baik dan benar.
- b. Siswa dapat membaca, menulis, menghafal (surat-surat pendek) dengan baik dan benar.
- c. Siswa berakhlak mulia.

Untuk menunjang tema sentral tersebut, maka dikembangkan buku pedoman penilaian PAI – SD yang intinya meliputi ranah kognitif, afektif, psykomotorik dengan berbagai macam metode, antara lain metode penilaian portofolio.

BSNP sendiri memberikan rambu-rambu terhadap keberadaan KKM sebagai standar persekolahan yang seharusnya dibuat dan digunakan di sekolah tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa KKM dibuat se-Kecamatan sedangkan acuan penilaian yang dibuat BSNP 2006 tidak sesuai dengan Dirjen Bimbaga Islam, sehingga realitas teknis oleh Depag Kota Tegal dengan dipandu oleh waspendais. Keunikan tersebut ada signifikansi jika diadakan penelitian.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Secara akademik diakui bahwa sudah banyak penelitian dan buku ilmiah yang mengupas tentang kurikulum dan problematikanya. Kalau dicermati secara detail belum ada yang membahas tentang Penerapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran PAI SD se-kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Sebagai tinjauan pustaka, di bawah ini penulis paparkan beberapa tulisan hasil penelitian yang sekiranya mendekati atau ada kecondongan tinjauan tentang penilaian maupun KTSP dan penerapannya.

1. Nora L, Purnamasari, Universitas Negeri Malang, 2007 dalam judul Upaya Meningkatkan Ketuntasan Belajar Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 7 Malang Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus II bila dibandingkan dengan siklus I. Ketuntasan belajar siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan siklus I. Respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD dirasa menyenangkan, dapat mempermudah memahami materi pelajaran ekonomi, siswa juga menjadi lebih berani

untuk mengeluarkan pendapat, serta ketuntasan belajar mereka juga dapat meningkat.

- Penelitian ini tidak menyentuh obyek penerapan KKM, tapi membahas tentang ketuntasan belajar yang meningkat sesuai dengan siklusnya. Sedangkan penulis akan meneliti tentang penerapan KKM.

2. Haslita Rahmawati Hasan, Tesis Program Pascasarjana UM, 2010, judul Identifikasi Kesulitan yang Ditemui Guru dalam Pembelajaran Geografi Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada SMP Negeri Se-Kabupaten Gowa. Tulisan ini menyoroti keterlaksanaan KTSP, bahwa implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum tersebut dalam pembelajaran. Kemampuan guru tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap implementasi kurikulum, serta tugas yang dibebankan padanya. Tidak jarang kegagalan implementasi kurikulum di sekolah disebabkan kurangnya pemahaman guru terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Penyebab terjadinya kesulitan guru dalam pembelajaran geografi dikarenakan: (1) proses sosialisasi kurikulum yang berlaku belum dilaksanakan secara menyeluruh; (2) pembinaan dan pengembangan terhadap sumber daya guru belum memadai, akibatnya pemahaman dan penafsiran mengenai KTSP sangat terbatas; dan (3) masih dijumpai disparitas fasilitas pendidikan antar sekolah, hal ini tentunya akan menghambat keterlaksanaan implementasi KTSP, karena KTSP lebih berorientasi pada

kemampuan praktik (skill) daripada segala teori dan konsep pengetahuan. Penelitian deskriptis ini bertujuan mengidentifikasi dan memperoleh gambaran kesulitan yang dialami guru dalam pelaksanaan KTSP yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, juga dalam melaksanakan evaluasi, guru kesulitan menyusun instrumen penilaian.

➤ Penelitian ini terfokus pada kesulitan guru pada mapel geografi mendasar KTSP, sedangkan maksud penulis hendak meneliti penerapan KKM mapel PAI – SD. Memang KKM sendiri tidak bisa terlepas dari KTSP, namun penelitian Haslita tidak pada mapel PAI – SD.

3. Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D dan Drs. Nuryanto, M.Pd, FKIP Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi, 2008, dalam judul penelitiannya Profil Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Propinsi Jambi (Studi Evaluatif Pelaksanaan KTSP, SD, SMP, dan SMA).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di provinsi Jambi. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pada semua jenjang elemen-elemen KTSP belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik yakni (a) penyusunan pengembangan KTSP, (b) pengembangan silabus, (c) pengembangan diri, (d) pembelajaran terpadu,

(e) pengembangan muatan lokal, (f) penyusunan rancangan penilaian hasil belajar, (g) penyusunan laporan peserta didik.

Dalam proses pembelajaran guru telah menerapkan prinsip-prinsip dasar pedagogi modern dan mengutamakan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tepat. Indikatornya, (1) kelengkapan persiapan mengajar guru, bahan ajar, serta media pembelajaran; (2) kesesuaian pembelajaran dengan skenarionya dan bervariasinya metode pembelajaran yang digunakan; dan (3) ketepatan dalam pemberian tugas, pemanfaatan sumber belajar, dan penggunaan perangkat evaluasi yang tepat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa. Namun, dari perspektif kualitasnya, guru masih membutuhkan pembimbingan.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan KTSP hendaknya dikembangkan secara sinergis antara siswa, guru dan sekolah. Siswa diarahkan secara benar tentang hakekat belajar yang aktif, kreatif dan inovatif yang tertuang dalam RPPnya. Guru secara konsisten melaksanakan tugasnya mulai dari menyiapkan perangkat pembelajaran, RPP, program semesteran, mengidentifikasi materi dan pengalaman belajar, merancang setting pembelajaran, melaksakan evaluasi dan melaporkan hasil siswa dalam kerangka dan model KTSP.

Hasil penelitian ini condong pada peran KTSP sebagai tolok ukur pengembangan kurikulum yang sekarang.

Disini juga diangkat salah satunya adalah belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dalam penyusunan rancangan penilaian hasil

belajar. Sedangkan maksud penulis akan mengangkat peranan KKM PAI – SD.

4. Joko Sulistya. Validitas Prediktif Hasil Belajar Bahasa Inggris Sekolah Dasar Se-Kecamatan Bantul. Tesis. Yogyakarta. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pengaruh hasil belajar bahasa Inggris di Sekolah Dasar, khususnya Sekolah Dasar se-kecamatan Bantul tahun pelajaran 2006/2007, terhadap hasil belajar bahasa Inggris di SMP, (2) sumbangan nilai ujian akhir sekolah (UAS) bahasa Inggris di kelas VI Sekolah Dasar terhadap nilai Ujian Semester I bahasa Inggris kelas VII Sekolah Menengah Pertama, dan (3) sumbangan nilai rapor bahasa Inggris kelas VI di Sekolah Dasar terhadap nilai rapor bahasa Inggris kelas VII di Sekolah Menengah Pertama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada pengaruh hasil belajar bahasa Inggris kelas VI Sekolah Dasar terhadap hasil belajar bahasa Inggris kelas VII SMP. Agar nilai UAS dan nilai rapor kelas VI SD mempunyai prediktor yang baik, perlu dilakukan pengembangan kualitas soal, kriteria perskoran test dan standarisasi penilaian rapor bahasa Inggris, baik rapor SD maupun rapor SMP.

Pada penelitian tersebut disarankan adanya pengembangan kualitas soal, kriteria penskoran dan standar penilaian. Hal ini ada kedekatan dengan maksud penulis tentang standar minimal nilai matang. Tapi analisisnya belum juga sampai pada penerapan KKM.

5. Alfi Laila: Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Portofolio dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah I Pare Kabupaten Kediri. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. 2009

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) perencanaan penilaian portofolio, (2) pelaksanaan penilaian portofolio, dan (3) penilaian portofolio peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia MI Muhammadiyah I Pare Kabupaten Kediri.

Hasil Penelitian dapat dirinci menjadi tiga. Pertama perencanaan penilaian dalam kategori baik. Dalam hal pelibatan peserta didik belum terlaksana dengan baik. Kedua, kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian portofolio sudah memadai dan masuk dalam kategori baik. Dalam hal penentuan jadwal konsultasi tidak ada, semua guru belum meminta peserta didik untuk merefleksikan hasil kerjanya, baik secara lisan maupun tulisan. Ketiga, pelaksanaan penilaian dalam kategori baik, penentuan tugas portofolio, menyusun, dialog dilakukan oleh sebagian guru. Penyimpanan portofolio sudah baik sekali, penilaian sepenuhnya dilakukan oleh guru, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk menilai karya sendiri.

Maksud penulis keterlibatan peserta didik dalam pembinaan PAI – SD sangat dominan terlebih pada BTQnya, maka selama berorientasi pada unsur penilaian penulis meyakini ada kedekatan dengan apa yang akan diteliti kelak bagi penulis.

Dari berbagai sumber tinjauan pustaka yang terkait dengan KKM, tidak ada yang secara khusus meneliti keterkaitannya dengan Pendidikan Agama Islam SD. Terutama pada penerapan KKMnya.

Dengan demikian di Kecamatan Tegal Timur belum pernah ada penelitian ilmiah terkait dengan pendidikan khususnya menyoroti tentang KKM PAI – SD Negeri.

Namun secara merata keberadaan KKM terkait dengan mata pelajaran apa saja, tentu dijadikan patokan dasar, sehingga mengukur berhasil atau tidaknya pembelajaran di kelas ataupun di sekolah mendasar pada penerapan target KKM.

Jika penulis mengambil mapel seni rupa, matematika maka terlihat acuan KKMnya dijadikan standar juga. Sehubungan dengan ketentuan BSNP 2006, maka seluruh standar kompetensi, Kompetensi Dasar lalu indikator pembelajaran dinormatiskan dengan angka. Dengan demikian, adanya keterpaduan materi ajar satu dengan yang lainnya mesti berhubungan lebih dahulu dengan KKM.

Keterpaduan materi yang dimaksudkan disini adalah keterpaduan antara materi Pendidikan Agama Islam dengan materi pelajaran lain. Dan tentu dalam Pendidikan Agama Islam terdapat banyak sekali materi yang memerlukan penjelasan-penjelasan yang rasional, luas dan mendalam. Untuk maksud itu maka setiap Guru Agama Islam dituntut memperluas wawasan pengetahuan lain selain materi Pendidikan Islam. Selanjutnya pada penulisan

ini akan diangkat kondisi riil keberadaan Guru Pendidikan Agama Islam SD di Tegal Timur.

Melihat banyak hal yang mendukung atau mempengaruhinya penilaian Pendidikan Agama Islam tersebut, tentu saja aspek penilaian Pendidikan Agama Islam tidak sebatas yang digariskan atau sesederhana apa yang dituangkan oleh BSNP 2006. Sebab banyak terkait dengan pengalaman Agama yang kelak masuk dalam aspek afektifnya, sehingga guru agama akan selalu berupaya mengamati, mengenal perbedaan individu tentang amaliyah sehari-hari hal ini tidak bakal mudah memberikan nilai delapan atau enam sekalipun bagi GPAI sebab sudah pasti ada riwayat penilaian yang mendahuluinya yaitu mengamati, mengenal, dan memperhatikan secara individu tadi. Apalagi untuk nilai akhir pendidikan agama Islam tentu dihadapkan pada ranah pembinaan lebih dahulu agar hasil tes yang telah dilakukan oleh guru dapat diinterpretasikan dengan beberapa cara, interpretasi terhadap skor siswa dapat menggunakan peringkat, rata-rata atau membandingkannya dengan rata-rata kelompok, meskipun interpretasi berbeda tetapi tetap menunjukkan posisi sama pada diri siswa. Variasi interpretasi memberikan keluasan kepada guru untuk memilih pembinaannya.

Setelah tes dilakukan di ruang kelas, langkah selanjutnya menginterpretasi hasil tes, untuk tujuan ini maka dapat menggunakan PAN (Penilaian Acuan Norma) atau kriteria penilaian relatif (Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, 2001 : 149). PAN ini memungkinkan sekali dapat menjurus ke program berikutnya (remidi atau pengayaan bahkan percepatan).

Keith A. Acheson dan Meridith Damien Gall dalam bukunya yang berjudul "*Techniqui in the Clinical Supervition of teachers* (1992 : 23) terjemahan : Ahmad Azhari dalam bukunya *Supervisi Rencana Program Pembelajaran* (2003 : 28) merumuskan empat belas ciri-ciri guru yang baik sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan yang positif dengan siswa
2. Memperhaitkan terhadap emosi siswa
3. Memelihara disiplin kontrol
4. Menciptakan lingkungan yang nyaman ( kondusif ) untuk belajar
5. Mengenal dan memperhatikan perbedaan individu
6. Menikmati bekerja dengan Siswa
7. Mengupayakan keterlibatan siswa dalam belajar
8. Kreatif dan Inovatif
9. Menekankan keterampilan membaca
10. Memberi siswa image diri yang baik
11. Aktif dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalitas
12. Menguasai materi secara mendalam
13. Fleksibel
14. Konsisten

Justru kalau dilihat sebuah sistem yang berubah dari sentralisasi ke desentralisasi pendidikan, seharusnya sekolah dapat sepenuhnya mampu menggarap sistem penilaiannya secara penuh sampai pada sub sistemnya misalnya penilaian pembelajaran antara PAI dengan mapel lainnya. Dan kalau hal ini dapat ditempuh niscaya kualitas nilai yang dihasilkan oleh sekolah akan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Namun yang ada bahwa keberpihakan pusat masih bisa merembes pada kebijakan vital misalkan apa yang dilihat pada BSNP 2006 (2006 : 5); penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian melalui :

- 1) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik.
- 2) Ujian, ulangan dan / atau penguasaan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Firdaus M. Yunus (2005 : 97) menyebutkan bahwa : desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan penuh pada sekolah untuk mengelola pendidikan dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengangkat guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pemerintah pusat hanya menjadi pengarah dan pengontrol hal-hal yang dianggap pokok saja.

Selanjutnya pendidikan agama Islam unsur kegiatan pembelajaran meliputi tujuh komponen pokok yaitu keimanan, ibadah, akhlakal quran, syariah, muamalah, dan tareh yang semuanya dikembangkan dalam proses belajar mengajar dan sangat menitik beratkan pada tiga aspek dalam diri peserta didik yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan nilai), psikomotorik (keterampilan). Merumuskan tujuh komponen besar dalam kegiatan belajar mengajar mengandung arti bahwa pendidikan agama Islam bukan sekedar mendidik dan mengajar tapi sekaligus mendidik, mengajar dan melatih serta mencontohkan akhlak mulia. Dengan harapan kemampuan dasar yang dimiliki siswa dapat dibimbing yang niscaya tumbuh dan berkembang mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana tujuan pendidikan agama Islam.

Jika menengok kembali pada BSNP 2006 yang menyamakan kelompok mata pelajaran agama dengan kewarganegaraan dan kepribadian lalu cara

penilaiannya melalui jalur pengamatan dan ujian, maka khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam tentu ada aspek yang tertinggal, artinya tidak bisa teramati yaitu membaca dan menulis huruf alqur'an. Sebab SK – KD ini pasti harus dilatihkan (di drill) terus menerus sampai ada hafalan dan mengartikan surat-surat alqur'an yang pendek-pendek.

Berbagai pertimbangan yang diambil bagi guru Pendidikan Agama Islam, ketika hendak memberikan nilai akhir bagi siswanya. Sebab keterikatan emosional beragama bagi anak-anak SD di Kecamatan Tegal Timur sangat kental, walaupun secara nyata tidak bisa baca tulis alqur'an, tapi ketika nilainya di bawah standar KKM, guru, kepala sekolah akan mempertanyakan bagaimana kelak tentang kenaikan kelasnya.

Inilah bagian dari memaknai kelompok mapel agama bersama dengan kewarganegaraan dan kepribadian.

Berikutnya bagaimana tinjauan penilaian pendidikan agama Islam sehubungan banyaknya perangkat yang melingkupi keberhasilannya, seperti yang disebutkan di depan bahwa BSNP memberikan patokan dasar terhadap penilaian mata pelajaran agama adalah afektif dan sikap. Sebenarnya memahami kebijakan ini rancu juga. Sebab penulis melihat acuan standar penilaian yang dibuat BAN-S/M (2009 : 53), teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Jawabannya apabila sebanyak 96% - 100% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian, memperoleh akreditasi A. Dan dengan demikian maka pengembangan diri dan kemampuan GPAI seharusnya

melebihi dengan guru mata pelajaran lainnya. Sebab tanpa motivasi yang kuat dengan memacu diri untuk berkembang, tidak akan bisa mencapai tujuan yang dinyatakan dalam indikator atau bahkan bisa dikatakan hasil penilaian tidak dapat digunakan sebagai dasar yang akurat dalam pengambilan berbagai keputusan.

Ada sebuah tulisan yang dapat dipandang sebagai standar simpel tentang hasil penilaian yang baik yaitu Dirjen Bimbaga Islam ( 2003 : 6 ) menyatakan bahwa hasil penilaian yang baik adalah hasil penilaian yang diperoleh dari pelaksanaan penilaian yang baik dan cermat, serta dengan menggunakan alat pengumpul data yang valid dan reliabel, obyektif, rasional dan dapat dipercaya. Obyektif artinya semata-mata pada data yang diperoleh dan diolah secara cermat, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan subyektifitas penilai.

Beberapa konsep teori yang diungkapkan di atas betapa baiknya jika diterapkan tetap akan senantiasa menunjukkan tes itu adalah obyektifitas atau malahan subyektifitas. Hal ini artinya tidak bisa dijadikan ukuran pasti. Sehingga pandangan yang sedang berkembang terhadap penilaian pendidikan yaitu pendekatan penilaian portofolio, yang memungkinkan sekali sebuah alternatif pemecahan kejumudan terhadap penilaian pendidikan.

Sebagaimana Dirjen Bimbaga Islam (2003 : 94) menyebutkan bahwa portofolio adalah suatu informasi bagi suatu berkas bahan pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian kinerja yang obyektif. Berkas tersebut berisi pekerjaan siswa dokumen atau gambar, yang menunjukkan

bahwa apa yang dilakukan seseorang dalam lingkungan dan suasana kerja yang alamiah, yang sesungguhnya bukan dalam lingkungan yang dibuat-buat.

Dalam dunia pendidikan terutama sekolah, bahan-bahan yang dimaksud menjadi ukuran kinerja siswa, seberapa baik tugas-tugas yang diberikan kepada siswa telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengajaran yang ada dalam kurikulum, atau sesuai dengan tujuan persyaratan kualitas yang ditentukan.

Apabila melihat ukuran teoritis seperti yang disebutkan di atas, maka hemat penulis penerapan penilaian portofolio untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam akan sangat relevan dan niscaya teruji secara transparansi sebab bahan yang dibutuhkan dan kinerjanya selalu melibatkan aktifitas setiap siswa dan bahkan menjurus pada penilaian kolaboratif, artinya melibatkan kerjasama terutama antara guru, siswa dan orang tua.

Bahkan Prof. Dr. A. Azizy, M.A, dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial* (2002 : 67), menulis tentang penilaian sampai pada tingkat discovery (the joy of discovery) inilah yang menjadi inti pendidikan modern. Inti diskusi adalah berani menyampaikan pendapat dan menilai baik (yang bermoral), buruk (tidak bermoral) serta mengajak anak untuk sampai pada discovery. Penilaian tersebut bukan dasar pendidikan, namun atas dasar argumentasi atau pemahaman sesuai dengan akal mereka. Model ini tentu akan lebih dihayati oleh anak daripada sekedar “harus mengikuti” apa maunya guru. Intinya

adalah komunikasi dialogis. Oleh sebab itu diskusi bukan saja dimulai sejak anak prasekolah.

Selanjutnya penulis mengangkat KTSP yang didalamnya memberikan acuan awal sebagai pijakan nilai adalah KKM dan apabila membicarakan perihal KTSP tidak bisa melepaskan diri dari pengertian kurikulum.

Sebuah tulisan Dirjen Bimarga Islam (2005 : iii) menyebutkan tentang upaya peningkatan kualitas akan lebih memberikan hasil maksimal jika dilakukan secara komprehensif oleh seluruh stakeholdernya termasuk Departemen Agama. Diantara faktor penting terkait dengan peningkatan kualitas itu ada ketersediaan kurikulum yang memiliki relevansi tinggi dan terimplementasi secara efektif. Relevansi dan efektifitas kurikulum semakin menjadi kebutuhan ketika dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Berkaitan pandangan ini tentunya guru dan pihak lain yang terkait dalam memahami dan menerapkan kurikulum, bukan menjadi beban apalagi menjadikan kreatifitas guru terhenti.

Langkah nyata di Kota Tegal membuktikan bahwa dengan didanai APBD Kota Tegal 2007 menyelenggarakan sosialisasi KTSP khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SD. Hal ini diikuti oleh seluruh guru Agama Islam SD Negeri maupun swasta, GTT maupun PNS. Dan menyikapi hal ini, Kandepag Kota Tegal secara periodik lewat pengawas sekolahnya memandu KKG – PAI SD (Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam SD) hingga kini.

Muhamad Atiyah Al-Abrasi (1993 : 163) mendesain kurikulum berdasarkan tingkat pendidikan, *pertama* : kurikulum tingkat pertama dalam pendidikan Islam. *Kedua* : kurikulum tingkat pendidikan Islam.

Kurikulum tingkat dasar menurutnya paling tidak harus memasukkan Al-Qur'an, tauhid, membaca, menulis, matematika, bahasa Arab, sejarah, akhlak dan khot. Apabila orientasi penulis pada ketuntasan belajar tentu banyak faktor yang menurut para ahli semestinya diharapkan agar mencapai penguasaan.

E. Mulyana menulis, guru harus meyakinkan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai penguasaan penuh dalam belajar (E. Mulyana, 2006 : 54).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Fakta dan data**

Segala sesuatu yang dijadikan bahan dalam mencari kebenaran terhadap semua aspek yang ada di obyek penelitian disebut *fakta*. Fakta dalam penelitian ini termasuk aturan/petunjuk cara menentukan KKM, buku-buku petunjuk baik referensi dari Diknas, Depag maupun selain dari kedua institusi tersebut dan keputusan. Keputusan KKG PAI – SD serta buku notulen rapat dinas rutin setiap bulan yang diikuti oleh pengurus KKG PAI – SD se Kota Tegal.

Upaya mencari kebenaran tertentu dalam penelitian ini secara terbatas atau penggalan-penggalan atau bagian-bagian dalam penelitian ini disebut *data*.

Sebagian penulis angkat data, bahwa BSNP 2006 mengelompokkan mata pelajaran agama bersama-sama dengan mata pelajaran kewarganegaraan dan budi pekerti, KKG PAI – SD mampu menjembatani keseragaman KKM mata pelajaran agama enam koma lima.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif dengan banyak menggunakan logika hipotik verifikasi dengan analisis dokumen yaitu mengumpulkan data lewat kajian atas esensi dari bahan yang terdapat dalam administrasi, inventarisasi putusan-putusan, surat-surat penting, buku kerja. Dengan bobot intensitasnya :

- a) Kajian eksistensi (keberadaan sesuatu)
- b) Kajian esensi (isi sesuatu)
- c) Kajian substansi (inti/hakikat sesuatu)

## 3. Sumber data

Sumber data didapat dari guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar untuk memperoleh keterangan teknik penilaian normatif (harian), mid semester (tengah semester), semester terhadap domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan kearsipan dan dokumen-dokumen penting diperoleh dari kepala sekolah dan dari Mapenda Kandepag Kota Tegal.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a) Wawancara

Upaya menyimpulkan data lewat dialog interaktif dengan wawancara bebas tanpa instrumen terikat terhadap butir-butir wawancara yang sistematis. Sasarannya dalam hal ini kepada :

1. Kepala Seksi Kemadrasahan dan Pendidikan (Kasi Mapenda) Kandepag Kota Tegal.

Untuk memperoleh keterangan dokumen-dokumen, putusan-putusan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan fakta dan data. Terutama tentang jumlah guru agama Islam SD baik yang NIP.15 maupun yang NIP.13 dan yang GTT. Tentang teknik pelaporan dan pembinaannya dan bagaimana sikap atau kebijakan apa yang diambil terkait dengan keputusan KKG PAI – SD.

2. Kepala Sekolah SD Negeri se Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Untuk mendapatkan validitas data yang terkait dengan pelaporan GPAInya.

3. Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI – SD)

Untuk mendapatkan informasi tentang teknik penilaian, kemudahan dan kesulitan penilaian akhir sehubungan dengan di dalam Pendidikan Agama Islam SD, ada pula muatan BTQ.

4. Pengawas Sekolah

Terkait dengan penelitian KKM PAI – SD maka penulis melengkapi semua aspek metodologi pengumpulan data kepada pengawas sekolah Kandepag Kota Tegal, untuk mendapatkan keterangan pendukung tentang keberadaan GPAI di Kecamatan Tegal Timur, prestasi Mapel PAI dan kesulitan serta kemudahan binaannya kepada mereka.

b) Observation (Pengamatan)

Upaya pengumpulan data lewat penggunaan alat pengindraan alami dengan perhatian yang luas dan serius terhadap dinamika proses

penilaian dan hasil penilaian. Hal ini penulis mendapatkan buku daftar nilai yang mengangkat nilai formatif (kognitif, afektif dan psikomotorik), mid semester, semester dan ko kurikuler serta nilai BTQ.

c) Dokumentasi

Menemukan faliditas materi yang bersumber dari teknik wawancara dan observasi non sistemik yang akan dianalisa pada langkah berikutnya.

d) Analysis dokumen

Hasil pengumpulan data lewat kajian atas esensi dari bahan yang terdapat dalam dokumen administrasi, putusan-putusan, referensi lain yang diperoleh dari Mapenda, Kepala SD Negeri, Guru Pendidikan Agama Islam dan Pengawas Sekolah.

Adapun bobot intensitasnya:

1. Pencatatan atas studi kritis terhadap model penilaian kelas BSNP 2006 mapel PAI – SD.
2. Pencatatan atas SWOT  
(Strength = kekuatan; Weakness = kelemahan; Opportuny = peluang dan Threaten = ancaman), keberadaan penerapan KKM PAI – SD dan Model Penilaian Kelas BSNP 2006.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistem penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berurutan.

Bab pertama memperkenalkan latar belakang masalah atau kegelisahan yang

muncul. Kemudian dirumuskan masalah dalam suatu pemikiran yang sistematis dan dikemukakan tujuan dari penelitian serta pada sub bab berikutnya ada beberapa tinjauan pustaka yang melengkapi kepastian berfikir dan selanjutnya dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengangkat judul keterpadua interpretasi penilaian dalam BSNP 2006 dengan PAI – SD Negeri Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan sub bab interpretasi hasil penilain dalam BSNP 2006, model penilaian kelas BSNP 2006, penilaian PAI – SD dalam BSNP 2006, ragam penilaian PAI – SD dan program layanan tuntas PAI – SD.

Bab ketiga, KKM dan penerapannya pada mapel pendidikan agama Islam di SD Negeri Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, KKM dan PAI – SD Negeri se Kecamatan Tegal Timur, PAI – SD di wilayah kepengawasan sekolah Kandepag Kota Tegal, KKM target belajar tuntas, landasan penerapan KKM PAI – SD.

Bab empat, analisis penerapan KKM PAI – SD se Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal; melalui kriteria penetapan KKM, kompleksitas indikator, kemampuan sumber daya pendukung, tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, dilanjutkan proses domain kognitif, afektif dan psikomotorik.

Bab lima penutup, simpulan dan saran. Selanjutnya dilengkapi daftar pustaka.